

Peran Pemerintah Desa Dalam Penataan Lingkungan Pemukiman Di Desa Kinopasan Kabupaten Tolitoli

Hasliani^{1*}; Abd Kahar²; Eka De Pantmonsela Liow³

¹²³ Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Madako Tolitoli

email; haslianiiii13@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran yang dijalankan oleh pemerintah desa dalam upaya penataan lingkungan pemukiman, khususnya penataan pemukiman jalan menuju kantong produksi perkebunan masyarakat, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penataan lingkungan pemukiman di Desa Kinopasan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang yang dipilih melalui *teknik purposive*, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, Kepala Dusun, Ketua BPD, Serta tiga orang perwakilan masyarakat Desa Kinopasan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kinopasan. Proses analisis data yang digunakan peneliti yaitu melalui tahapan pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian Data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan enam indikator peran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi instruktif sudah terpenuhi karena kepala desa menjalankan peran kepemimpinan dengan baik, memberi arahan bijak dalam penataan lingkungan permukiman demi kepentingan masyarakat. Fungsi konsulatif sudah terpenuhi karena pemerintah desa mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait penataan jalan di Kinopasan. Fungsi pelayanan masyarakat sudah cukup baik karena Pelayanan pemerintah desa dinilai cukup baik dalam hal komunikasi dan keterbukaan, namun masih terkendala anggaran dalam penataan fisik, terutama perbaikan jalan. fungsi pengembangan masyarakat sudah terpenuhi karena pemerintah desa selalu melibatkan warga secara gotong royong dalam pembangunan dan menjadikan mereka sebagai penilai kebutuhan desa. Partisipasi pikiran masyarakat sudah terpenuhi karena mereka dilibatkan dalam memberi ide dan gagasan saat perencanaan pembangunan desa. Partisipasi tenaga kerja masyarakat Desa Kinopasan Keterlibatan tenaga masyarakat cukup baik melalui gotong royong, namun belum maksimal karena keterbatasan waktu dan kesibukan pekerjaan masyarakat (Terutama petani).

Kata Kunci : Peran; Pemerintah Desa; Lingkungan Pemukiman

PENDAHULUAN

Desa telah menjadi pondasi awal terbentuknya struktur kehidupan masyarakat politik dan sistem pemerintahan di Indonesia terbentuk dan berkembang bahkan sejak sebelum negara ini resmi berdiri. Dalam Konteks pembangunan nasional, desa memegang peranan penting sebagai unit strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, pembangunan desa suatu keharusan guna mempercepat terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Pembangunan sendiri dapat dipahami sebagai serangkaian upaya yang dirancang secara sadar dan sistematis oleh suatu bangsa atau negara untuk mencapai kemajuan dan modernisasi, termasuk dalam aspek ekonomi. Agar pembangunan ekonomi berjalan secara optimal, diperlukan penerapan model otonomi daerah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah, yang pada akhirnya akan mendorong percepatan pembangunan di tingkat desa (Abe, 2005).

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang berperan sebagai wadah utama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bersama serta mengupayakan kepentingan kolektif. Seiring dengan perkembangan yang terjadi, desa perlu dilindungi dan diperkuat agar dapat berkembang menjadi wilayah yang maju, mandiri, dan demokratis. Dengan demikian, desa memiliki potensi sebagai landasan utama dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya akan mengarah pada terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan makmur (Lestari, 2021).

Peran Pemimpin bukan hanya didalam lingkup kerjanya tetapi juga dilingkungan masyarakatnya, jadi peran pemimpin itu sangat penting (Daniati, 2022). Peran pemerintah sangat krusial dalam memajukan pembangunan di tingkat desa, khususnya dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Untuk itu, pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan harus dijalankan dengan baik agar tercipta tata kelola yang efektif, khususnya dalam menata lingkungan permukiman yang layak dan tertata di kawasan pedesaan.

Peran serta inisiatif pemerintah masih memegang kendali utama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, maupun dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran serta kapasitas teknis masyarakat desa terkait penataan lingkungan. Dalam konteks ini, kesadaran dan keterlibatan partisipasi warga desa menjadi faktor kunci keberhasilan proses penataan desa tersebut. Namun, guna membangun kesadaran warga desa terhadap pentingnya penataan, sebagai langkah dalam memperbaiki kondisi sosial serta mendorong partisipasi masyarakat. warga sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan di tingkat desa, khususnya peran kepala desa kinopasan sebagai pemimpin pemerintahan desa. Sebagai pemegang tanggung jawab tertinggi dalam struktur pemerintah desa, kepala desa memiliki peran penting sebagai pelaksana utama sekaligus penggerak dalam mewujudkan penataan lingkungan permukiman serta dalam membangun kesadaran masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut guna mengambil peran dalam upaya penataan lingkungan permukiman di Desa Kinopasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli.

Desa Kinopasan salah satu dari 14 desa yang terletak di Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, dengan luas wilayah mencapai 64.800 km². Di bagian selatan Desa Kinopasan berbatasan langsung dengan Desa Ogomoli, Adapun di bagian utara, wilayah ini berbatasan langsung dengan Desa Malangga. Disisi Barat bersebelahan dengan Desa Lakatan, dan di bagian timur berbatasan langsung dengan Kawasan cagar alam Gunung Dako. Secara geografis, Desa Kinopasan terletak di wilayah pegunungan, dengan area hutan seluas kurang lebih 10.000 hektar dan wilayah sungai sekitar 5.000 meter.

Menurut (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman), Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Penataan lingkungan merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengelola suatu Kawasan tertentu agar dapat memberikan manfaat secara maksimal, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah. Sebuah Kawasan akan tampak sesuai karakteristiknya, jika kondisi lingkungannya dirawat dan diatur dengan baik, sesuai dengan fungsi dan peran yang dimilikinya serta disesuaikan dengan jenis Kawasan tersebut (Siagian, 2000). Penataan lingkungan permukiman merupakan proses yang mencakup penyediaan infrastruktur dasar, salah satunya adalah jalan yang berperan penting dalam mendukung akses dan mobilitas masyarakat. (Soetomo, 2009) menjelaskan penataan lingkungan permukiman bertujuan untuk menciptakan tempat tinggal yang sehat, aman, dan nyaman, yang didukung oleh ketersediaan sarana dasar seperti jalan sebagai bagian dari kebutuhan utama masyarakat. Sejalan dengan itu (Sukardi, 2007) menegaskan bahwa penataan lingkungan tempat tinggal adalah suatu upaya kolektif untuk menciptakan lingkungan yang sehat, tertata, dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Oleh sebab itu, ketika ditemukan kondisi infrastruktur jalan desa yang mengalami kerusakan parah, hal tersebut mencerminkan belum maksimalnya peran pemerintah desa dalam merumuskan dan merealisasikan pembangunan yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat.

Lingkungan pemukiman yang tertata secara baik menjadi salah satu indikator penting dalam Lingkungan pemukiman yang tertata secara baik menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Penataan permukiman mencakup aspek infrastruktur dasar seperti akses jalan, sistem drainase, sanitasi, serta tata ruang hunian yang mendukung kenyamanan dan keselamatan warga. Pemerintah desa dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam penataan lingkungan pemukiman Termasuk pemukiman jalan menuju kantong produksi perkebunan di Desa Kinopasan, dalam mewujudkan pembangunan permukiman yang berkelanjutan dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Saya berharap pemerintah desa dapat lebih memperhatikan kondisi lingkungan permukiman, khususnya dalam penataan jalan yang hingga saat ini masih belum sesuai harapan masyarakat. Jalan yang rusak dan belum tertata rapi sangat menghambat aktivitas sehari-hari warga, baik dalam hal mobilitas, akses ke fasilitas umum, maupun kelancaran perekonomian desa. Saya berharap agar pemerintah desa lebih responsif terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat, serta segera mengambil langkah konkret melalui perencanaan dan penganggaran yang tepat untuk memperbaiki dan menata infrastruktur jalan dengan baik, merata, dan berkelanjutan. Dengan adanya perbaikan jalan, diharapkan kesejahteraan dan kenyamanan hidup masyarakat juga dapat meningkat.

Harapan masyarakat Desa Kinopasan terhadap penataan lingkungan permukiman sangat besar, khususnya terkait dengan peningkatan kualitas jalan yang mengarah ke kantong-kantong produksi. Jalan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi warga, seperti pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan. Namun, kondisi jalan yang rusak dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan, sering kali menjadi kendala dalam distribusi hasil produksi. Oleh karena itu, masyarakat menginginkan agar pemerintah desa bersama pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih dalam dan menjadi prioritas utama dalam program penataan lingkungan, guna menunjang kelancaran akses ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Terlepas dari harapan tersebut, kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa penataan lingkungan permukiman di Desa Kinopasan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Salah satu permasalahan utama yang sering dikeluhkan adalah kurangnya infrastruktur dasar yang memadai, khususnya dalam hal pembangunan jalan. Keberadaan jalan yang rusak atau belum dibangun secara optimal berdampak langsung pada aktivitas sehari-hari warga, termasuk akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Jalan ini merupakan satu-satunya akses vital yang digunakan oleh masyarakat Desa Kinopasan maupun warga desa sekitar untuk menuju ke kawasan kantong produksi perkebunan seperti cengkeh, cokelat, dan kelapa. Selain itu, jalan tersebut juga kerap dilalui oleh para pecinta alam yang hendak melakukan pendakian ke kawasan cagar alam Gunung Dako. Oleh karena itu, kondisi permukiman yang belum tertata dengan baik diharapkan dapat mengalami perubahan melalui peran aktif pemerintah desa dalam proses penataan lingkungan. Tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang layak, fungsi permukiman sebagai tempat tinggal yang nyaman dan mendukung kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat tidak dapat diwujudkan secara optimal.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada infrastruktur jalan yang berfungsi sebagai akses menuju kantong-kantong produksi masyarakat, khususnya berupa jalan rabat, jalan setapak, dan jalan cacing. Ketiga jenis jalan ini memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, terutama dalam hal pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah permukiman menuju lahan produksi.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan fakta bahwa kondisi infrastruktur jalan seperti jalan rabat, jalan setapak, dan jalan cacing menunjukkan kualitas yang tidak merata antar dusun. Meskipun sebagian jalan rabat telah dibangun dengan cukup baik, masih banyak titik yang belum tertata secara optimal, baik dari segi kelayakan permukaan maupun kenyamanan pengguna. Sementara itu, jalan setapak dan jalan cacing yang menjadi jalur utama masyarakat, terutama untuk mengakses area perkebunan, umumnya masih dalam kondisi rusak, berbatu, tidak rata, bahkan berlubang. Kerusakan tersebut berdampak langsung pada aktivitas warga, khususnya dalam mobilitas dan distribusi hasil pertanian. Kondisi ini semakin memburuk saat musim hujan, karena jalan menjadi licin dan sulit dilalui, mencerminkan belum optimalnya perhatian terhadap pengelolaan infrastruktur sebagai bagian penting dalam penataan lingkungan permukiman.

Jalan desa memiliki peranan penting dalam struktur lingkungan permukiman, karena berfungsi sebagai sarana pendukung kelancaran berbagai aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, infrastruktur jalan yang masih kurang memadai menunjukkan bahwa penataan kawasan permukiman belum sepenuhnya sesuai dengan standar kelayakan serta belum mencerminkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Gambar 1
Jalan Menuju Kantong Produksi



(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sebagaimana dialami oleh subjek yang diteliti. Pendekatan ini menjelaskan fenomena tersebut dengan kata-kata dalam konteks yang spesifik dan alami. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti bisa mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang variabel yang sedang diteliti (Moleong, 2017). Dalam pendekatan ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, yang secara langsung mengumpulkan data melalui interaksi dengan informan, observasi lapangan, dan dokumentasi.

Lokasi Penelitian (Darmadi, 2011) yaitu tempat dilaksanakannya kegiatan studi yang bertujuan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan yang diteliti. Sementara (Sujarweni, 2014) menjelaskan bahwa lokasi penelitian adalah tempat berlangsungnya seluruh proses penelitian. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah di Desa Kinopasan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. Peneliti mengambil lokasi ini karena di Desa Kinopasan merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah namun memiliki penataan lingkungan pemukiman masih kurang optimal seperti pemukiman jalan dan sarana maupun prasarana yang belum dikatakan sangat memadai.

Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan lebih. Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel data berdasarkan pertimbangan dan tujuan khusus. Pertimbangan tersebut mengacu pada pemilihan individu atau sumber data yang dianggap paling memahami dan memiliki informasi relevan terkait dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2016). Penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu agar dapat memberikan informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, ketua BPD dan masyarakat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran merupakan bentuk dinamis dari suatu kedudukan (Status), dimana ketika seseorang menjalankan hak serta kewajibannya, berarti ia tengah melaksanakan peran yang melekat pada kedudukannya (Soekanto, 2002). Aparatur pemerintah desa di Desa Kinopasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli berperann sebagai pemimpin sekaligus pelaksana pembangunan. Dalam menjalankan perannya, mereka dituntut untuk bertanggung jawab terhadap setiap perubahan yang terjadi, baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam aspek sosial kemasyarakatan. pemerintah desa sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di tingkat desa, perlu memiliki kemampuan berpikir logis dan bertindak bijaksana dalam menetapkan keputusan yang berdampak bagi masyarakat. Setiap keputusan yang diambil seharusnya mempertimbangkan kepentingan masyarakat agar tidak menjadi beban bagi mereka.

Selain itu, pemerintah desa juga harus berperan aktif sebagai ebagai penggerak, pendorong, sekaligus pelapor dalam setiap tahapan pembangunan yang dilaksanakan, demi memperoleh dukungan serta keterlibatan penuh dari masyarakat. Dalam hal ini, kepala desa sebagai pemegang otoritas tertinggi di tingkat desa memiliki posisi strategis dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya, yang dapat diukur dengan indikator-indikator tertentu.

Fungsi Instruktif

Fungsi instruktif mengacu pada bentuk komunikasi satu arah, di mana pemimpin bertindak sebagai penyampai perintah yang menentukan apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, kapan waktu pelaksanaannya, dan di mana kegiatan tersebut dilaksanakan agar keputusan yang telah dibuat dapat diterapkan secara efektif Sutikno (2014). Kepala desa menjalankan peran instruktif dengan memberikan arahan dan instruksi langsung kepada bawahannya. Hal ini sejalan dengan karakteristik kepemimpinan satu arah, di mana pemimpin

bertugas menetapkan keputusan dan mengarahkan pelaksanaannya kepada pihak-pihak yang berada di bawah kepemimpinannya.

Kepala desa menjalankan fungsi instruktif, yang berperan dalam memberikan perintah serta petunjuk pelaksanaan kepada aparat di bawahnya. Sebagaimana dijelaskan oleh (Harbani, 2008) fungsi instruktif merupakan bentuk kepemimpinan yang bersifat satu arah, di mana pengambilan keputusan dilakukan oleh pemimpin dan pelaksanaannya diarahkan langsung kepada bawahan.

Fungsi instruktif menjelaskan bagaimana aparat desa, sebagai perwakilan pemerintah desa, menetapkan dan mengarahkan perintah kepada masyarakat sehingga masyarakat mengikuti dan melaksanakan perintah yang diberikan oleh kepala desa dengan sikap penuh tanggung jawab (Veithzal Rivai, 2006). Adapun hasil analisis peneliti tersebut, bahwa selama ini Pemerintah Desa Kinopasan sudah menjalankan perannya dengan baik sebagai fungsi instruktif. Mereka kerap memberikan arahan dan himbauan positif guna mendorong kemajuan lingkungan serta pembangunan desa. Seperti yang telah kita pahami, sudah menjadi tanggung jawab kepala desa sebagai pemimpin untuk memberikan instruktif kepada aparat desa dan masyarakat desa terkait upaya peningkatan, baik dalam pelayanan pemerintahan maupun dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di desa dalam penataan lingkungan pemukiman.

Fungsi Konsultatif

Seorang pemimpin menjalankan fungsi konsultatif, yaitu dengan membuka ruang untuk mendengarkan serta mempertimbangkan masukan dari bawahannya sebelum menetapkan keputusan (Busro, 2018). Dalam menjalankan kepemimpinannya, Kepala Desa juga berperan sebagai tempat berkonsultasi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh desa maupun masyarakatnya. (Harbani, 2008) menjelaskan bahwa fungsi kepemimpinan yang bersifat konsultatif merupakan bentuk komunikasi dua arah antara pemimpin dan yang dipimpin, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan pemimpin. Sebelum mengambil keputusan, pemimpin biasanya membutuhkan berbagai masukan dan pertimbangan dari bawahannya.

Fungsi konsultatif berkaitan dengan Peran Pemerintah Desa, baik Aparat Desa maupun Kepala Desa, terhadap bagaimana cara menetapkan keputusan yang berkaitan dengan masalah desa (Veithzal Rivai, 2006). Hal ini khususnya bertujuan untuk mempermudah proses penataan lingkungan pemukiman sehingga masyarakat Desa Kinopasan, Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli dapat memahami serta mengelola lingkungan Bersama-sama.

Berdasarkan hasil analisis peneliti dengan berbagai informan, bahwa proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan Desa Kinopasan pada umumnya dilakukan secara partisipatif dan mengedepankan musyawarah. Pemerintah desa tidak mengambil keputusan secara sepihak, melainkan melibatkan berbagai unsur masyarakat serta lembaga desa, seperti BPD, sebagai mitra kerja dalam menyusun dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa, khususnya dalam penataan lingkungan pemukiman dan perbaikan jalan menuju area produksi masyarakat.

Musyawarah dianggap sebagai bentuk mufakat tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat di desa, yang menjadi dasar utama dalam menentukan arah kebijakan. Keterlibatan masyarakat dinilai penting karena merekalah pihak yang paling memahami kondisi dan kebutuhan desa secara langsung. Oleh karena itu, keputusan yang diambil diharapkan mampu mencerminkan kepentingan bersama serta tepat sasaran.

Selain itu, dari pandangan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, diketahui bahwa partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan desa sangat dibutuhkan, terutama dalam proyek-proyek fisik seperti perbaikan jalan pemukiman. Jalan yang masih dalam kondisi rusak menjadi hambatan utama bagi masyarakat, khususnya petani, dalam mengakses lahan perkebunan mereka. Masyarakat sangat mendukung program penataan infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah desa, karena dinilai memberikan dampak langsung terhadap

kelancaran aktivitas ekonomi warga. Dengan demikian, keberhasilan program pembangunan desa, khususnya penataan lingkungan pemukiman, sangat bergantung pada adanya kerja sama yang harmonis antara pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat. Kepala Desa Kinopasan juga dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga dan mendukung kemajuan desa secara menyeluruh.

Pelayanan Terhadap Masyarakat

Pelayanan dapat dipahami sebagai suatu bentuk tindakan dalam memberikan bantuan, mengatur atau memenuhi kebutuhan baik perorangan maupun kelompok. Tingkat keberhasilan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan public sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menegakkan kedisiplinan para petugas yang bertugas memberikan layanan tersebut, Sianipar dalam (Nur'aini, 2021). Pelayanan publik adalah hak setiap warga negara yang harus dipenuhi, sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakan berbagai bentuk pelayanan tersebut. Pada hakikatnya, setiap individu memerlukan pelayanan dalam kehidupannya, bahkan secara mendasar pelayanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi manusia. Pelayanan dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang memberikan manfaat dalam suatu sistem atau kesatuan, serta mampu menghadirkan kepuasan meskipun tidak selalu menghasilkan produk yang bersifat fisik.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini, menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pelayanan publik, dari pendekatan yang lebih bersifat administratif menuju model pelayanan yang lebih menekankan pada pengelolaan berbasis kepentingan dan kebutuhan masyarakat (Veithzal Rivai, 2006). Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, khususnya terhadap penataan lingkungan pemukiman jalan.

Berdasarkan hasil analisis peneliti tersebut, diketahui bahwa pemerintah desa telah menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat dengan cukup baik, terutama dalam aspek komunikasi dan keterbukaan terhadap aspirasi warga. Sekretaris desa menekankan pentingnya pelayanan yang lancar dan penyampaian informasi yang tepat waktu guna memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan desa. Kepala desa juga menegaskan bahwa pemerintahan desa merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal penataan lingkungan pemukiman seperti perbaikan jalan. Hal ini diperkuat dengan adanya kebijakan desa yang menampung aspirasi warga melalui musyawarah dan laporan langsung, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan program ke pemerintah kabupaten serta pelaksanaan pembangunan rabat beton di beberapa dusun. Dari sisi masyarakat, secara umum pelayanan dinilai cukup baik, meskipun masih terdapat keluhan terkait lambatnya penanganan kerusakan jalan, khususnya jalan setapak yang sulit dilalui saat musim hujan. Masyarakat mengakui bahwa pihak desa cukup responsif dan terbuka dalam menerima masukan, baik dalam kegiatan formal seperti musyawarah dusun maupun dalam diskusi langsung. Namun, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pembangunan fisik secara menyeluruh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun komunikasi dan pelayanan administratif telah berjalan cukup baik, upaya peningkatan pelayanan fisik secara cepat dan merata masih menjadi kebutuhan utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa.

Pengembangan Terhadap Masyarakat

Pengembangan masyarakat adalah suatu upaya dalam menciptakan kondisi sosial yang berkelanjutan melalui keterlibatan aktif warga, yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial serta sikap saling menghargai (Zubaedi, 2007). Selain itu, pemberdayaan ini juga dapat dimaknai sebagai pendekatan dalam praktik pekerjaan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan memanfaatkan potensi serta sumber daya

yang mereka miliki secara optimal, dan berorientasi pada nilai-nilai sosial (Edi Suharto, 2009). Oleh karena itu, inti dari pengembangan masyarakat ini terletak pada dukungan terhadap kelompok-kelompok warga yang memiliki kepentingan Bersama, agar mereka dapat berkolaborasi dalam mengidentifikasi kebutuhan yang ada serta melakukan tindakan guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Menempatkan masyarakat sebagai subjek penataan lingkungan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting sebagai salah satu pilar utama disamping pemerintah dan sektor swasta. Hal ini juga menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya bertindak sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga berperan sebagai perencana dan pengawas dalam berbagai program penataan lingkungan permukiman, baik yang berasal dari pemerintah maupun yang diinisiasi dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri (Veithzal Rivai, 2006).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan kunci seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan salah satu warga, dapat dianalisis bahwa Pemerintah Desa Kinopasan telah menunjukkan peran aktif dalam mendorong pengembangan masyarakat, khususnya dalam kegiatan penataan lingkungan pemukiman pada aspek perbaikan jalan. Kepala Desa menegaskan pentingnya semangat gotong royong sebagai nilai dasar yang digunakan untuk membangun partisipasi masyarakat. Hal ini tercermin dalam keterlibatan warga pada tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, seperti kerja bakti dan penyediaan fasilitas lingkungan termasuk perbaikan jalan kecil, drainase, dan penerangan jalan. Pendekatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga lingkungan. Selanjutnya, Sekretaris Desa menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat juga dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya keterlibatan warga dalam pembangunan desa. Pemerintah desa mengajak masyarakat berkontribusi langsung dalam kegiatan gotong royong, yang tidak hanya memperkuat solidaritas sosial, tetapi juga mempercepat penataan infrastruktur dasar seperti jalan permukiman yang menjadi akses utama masyarakat.

Dukungan terhadap pendekatan partisipatif ini juga ditegaskan oleh Ketua BPD. Ia menyampaikan bahwa pengembangan masyarakat tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan keterlibatan aktif masyarakat. BPD sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah desa, berperan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam musyawarah desa. Selain itu, BPD mendorong agar proses pembangunan dilakukan secara kolaboratif melalui gotong royong maupun masukan langsung dari warga, khususnya dalam perbaikan jalan yang menjadi kebutuhan mendesak di beberapa wilayah desa.

Dari sisi masyarakat, tanggapan positif juga diberikan. Warga melihat bahwa kegiatan gotong royong yang difasilitasi oleh pemerintah desa telah memberikan ruang partisipatif bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan lingkungan sekitar mereka. Kegiatan seperti membersihkan dan memperbaiki jalan dianggap sebagai bentuk kontribusi nyata warga terhadap perbaikan kondisi fisik desa. Secara keseluruhan, hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa indikator pengembangan masyarakat, khususnya dalam aspek pelibatan masyarakat, partisipasi gotong royong, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan pembangunan jalan, telah terpenuhi dengan baik. Upaya ini mencerminkan pola pembangunan berbasis partisipasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang turut menentukan arah pembangunan di lingkungannya.

Keberhasilan suatu program atau kebijakan seperti yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa, sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan peraturan yang ada. Penataan lingkungan dan pemukiman di desa Kinopasan sangat diperlukan, karena memiliki tujuan yang jelas agar sumber daya terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal dan efisien. Maksudnya dari tujuan tersebut adalah untuk

memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, sehingga tidak ada yang terbuang sia-sia dan semua potensi yang ada bisa dimanfaatkan dengan cara baik demi kemajuan desa.

Dapat kita lihat pentingnya peran serta masyarakat dalam proses penataan lingkungan dan pemukiman. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang kuat agar tingkat partisipasinya dapat maksimal. Dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam penataan lingkungan atau program program yang ada didesa, hal ini, menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran yang penting dan strategis, setara dengan pemerintah. Posisi masyarakat ini juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai perencana dan pengawas dalam kegiatan yang berhubungan dengan penataan lingkungan dan pemukiman. Tujuan utamanya adalah agar desa dapat berkembang dengan baik. Baik melalui program pemerintah maupun insiatif yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Partisipasi Pikiran

Partisipasi ide pikiran adalah partisipasi berupa sumbangsih pikira, pendapat yang konstruktif dalam memperlancarkan pelaksanaan program dan pengembangan, menurut Adisasmita dalam Rusni (2021). Partisipasi dalam bentuk pemikiran mencakup pemberian ide, saran, maupun pendapat yang bersifat membangun, baik dalam merancang program, mendukung kelancaran pelaksanaannya, maupun dalam upaya mewujudkannya. Bentuk kontribusi ini juga mencakup berbagi pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki untuk mendorong perkembangan kegiatan yang diikuti, sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan, (Dina Malihah, 2019).

Partisipasi pikiran mendorong masyarakat dalam berbagai program pembangunan didesa bukanlah tindakan yang dianggap yang dianggap remeh, Hal ini, disebabkan oleh adanya persepsi umum dikalangan masyarakat bahwa kegiatan pembangunan di desa merupakan tanggung jawab pemerintah, yang dianggap memiliki sumber daya anggaran yang memadai untuk meraelisasikan program-program tersebut (Veithzal Rivai, 2006).

Partisipasi pemikiran dalam konteks desa merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam proses berpikir, merencanakan, serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembangunan atau kegiatan yang didesa mereka. Ini mencakup kontribusi ide, pendapat, dan perspektif warga dalam merancang dan melaksanakan kebijakan, program atau aktivitas yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

Partisipasi semacam ini sangat penting karena memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk terlibat aktif dalam mengatasi masalah yang ada didesa serta memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Selain itu, partisipasi ini juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap pembangunan desa dan meningkatkan rasa tanggung jawab Bersama.

Berdasarkan hasil analis peneliti tersebut, dapat dianalisis bahwa proses pengambilan keputusan pembangunan di Desa Kinopasan telah menerapkan prinsip partisipasi aktif masyarakat melalui sistem musyawarah berjenjang, mulai dari tingkat dusun (Musdus) hingga desa (Musdes). Baik aparat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, hingga lembaga BPD, semuanya menekankan pentingnya melibatkan masyarakat sebagai pihak yang paling memahami kondisi riil lingkungan, khususnya terkait infrastruktur jalan pemukiman.

Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima hasil pembangunan, tetapi juga sebagai sumber gagasan dan pemikiran dalam menyusun program prioritas desa. Hal ini ditunjukkan melalui proses musyawarah yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan perbaikan jalan lingkungan, termasuk jalan menuju kantong produksi perkebunan yang menjadi jalur vital bagi aktivitas ekonomi warga.

Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat juga didukung oleh transparansi dan keterbukaan pemerintah desa dalam menerima usulan, serta konsistensi dalam menjadikan masukan masyarakat sebagai dasar dalam menyusun program tahunan. Dengan demikian, proses

perencanaan pembangunan di Desa Kinopasan telah berjalan secara partisipatif dan aspiratif, serta mencerminkan terpenuhinya indikator pengembangan masyarakat dalam bentuk kontribusi pemikiran terhadap penataan lingkungan pemukiman, terutama pada sektor perbaikan jalan.

Partisipasi Tenaga

Partisipasi menurut Suryadiningrat dalam Mulyana (2012) adalah Kemauan individu untuk mendukung keberhasilan suatu program sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Berdasarkan Pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa seharusnya terlibat aktif dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah mereka.

Partisipasi Dalam bentuk tenaga adalah Partisipasi yang merujuk pada keterlibatan masyarakat melalui kontribusi fisik atau kerja langsung dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan suatu program.

Keterlibatan tenaga kerja menjadi salah satu wujud nyata partisipasi masyarakat desa yang memiliki potensi besar untuk dimaksimalkan dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, khususnya dalam proyek-proyek fisik. Tujuan agar penataan lingkungan pemukiman di desa kinopasan dapat teratur menjadi lebih baik lagi. Melalui gotong royong dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan (Veithzal Rivai, 2006).

Keterlibatan tenaga kerja menjadi salah satu wujud partisipasi masyarakat desa yang memiliki potensi besar untuk dimaksimalkan, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan fisik di tingkat desa dengan tujuan agar penataan lingkungan pemukiman di desa kinopasan dapat teratur menjadi lebih baik lagi. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa memiliki peran yang sangat krusial. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif warga, pembangunan yang direncanakan tidak akan mencapai hasil yang optimal. Bagaimana cara atau upaya pemerintah desa mendorong masyarakat untuk terlibat secara langsung melalui tenaga atau kerja fisik dalam kegiatan pembangunan desa, khususnya dalam penataan lingkungan pemukiman seperti perbaikan jalan.

Berdasarkan hasil analisis peneliti tersebut, bahwa partisipasi tenaga masyarakat dalam pembangunan desa, khususnya pada kegiatan penataan lingkungan pemukiman seperti perbaikan jalan menuju kantong produksi, telah difasilitasi dengan cukup baik oleh pemerintah desa. Melalui pendekatan gotong royong, masyarakat dilibatkan langsung dalam pelaksanaan kegiatan fisik seperti membersihkan saluran air dan memperbaiki infrastruktur jalan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan fungsinya dalam membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat.

Namun demikian, keterlibatan masyarakat secara tenaga belum sepenuhnya optimal. Beberapa warga, khususnya yang bekerja sebagai petani, mengalami keterbatasan waktu dan tenaga karena harus memenuhi kebutuhan ekonomi harian. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat secara menyeluruh dalam setiap program pembangunan desa. Dengan demikian, meskipun upaya pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi tenaga sudah berjalan cukup efektif, tetap diperlukan strategi tambahan agar keterlibatan warga bisa lebih merata dan berkelanjutan.

Faktor Pendukung

Keterlibatan Masyarakat Atau Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa pemerintah desa Kinopasan telah menjalankan fungsinya dalam mengajak dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan desa, khususnya pada aspek fisik seperti perbaikan jalan menuju kantong produksi. Melalui pendekatan gotong royong dan musyawarah, masyarakat diajak untuk berperan serta dalam perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif dan komitmen bersama dalam membangun desa.

Namun demikian, keberhasilan upaya ini tetap menghadapi tantangan, terutama dalam hal ketersediaan waktu dan tenaga dari masyarakat, mengingat sebagian besar warga memiliki kesibukan utama sebagai petani. Oleh karena itu, meskipun strategi partisipatif sudah berjalan cukup baik, pemerintah desa masih perlu mencari pendekatan tambahan agar keterlibatan tenaga masyarakat dalam pembangunan, terutama pada sektor jalan produksi, dapat lebih merata dan optimal.

Ketersediaan Anggaran

Berdasarkan hasil analisis peneliti, bahwa dana digunakan dalam kegiatan ini dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Penandanaan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan penataan lingkungan dan pemukiman. Faktor Dana salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan didesa, seperti pelaksanaan penataan lingkungan pemukiman. Masyarakat tidak akan dapat melaksanakan suatu kegiatan tanpa adanya dukungan dana yang memadai.

Faktor Penghambat

Faktor yang menghambat masyarakat dalam penataan lingkungan pemukiman mencakup berbagai tantangan yang muncul dari dalam masyarakat itu sendiri, yang dapat menghalangi keberhasilan proses penataan. Terkait dengan kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat, kita dapat memahami betapa luas dan berbagai kendala yang menyulitkan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan partisipasi warga dalam program pembangunan dan kehidupan bermasyarakat. Pemerintah desa harus menyadari bahwa keberhasilannya tidak akan sempurna tanpa mempertimbangkan kekurangan, kendala, atau kebiasaan yang dihadapi masyarakat yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pembangunan yang dilaksanakan. Beberapa kendala atau kebiasaan tersebut diperhatikan secara cermat.

Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa Faktor ekonomi salah satu faktor penghambat penataan lingkungan pemukiman karena mayoritas penduduk desa ini bermata pencarian sebagai petani. Namun, mereka merasa pendapatan yang diperoleh dari Bertani masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Beberapa di antaranya terpaksa mencari pekerjaan diluar desa. Hal. Ini disebabkan oleh keterbatasan waktu untuk mengikuti kegiatan lain, Karena jika tidak bekerjadalam beberapa hari mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan danlain-lain. Selain itu, sejumlah masyarakat masih belum memiliki kepemilikan lahan pribadi, sehingga mereka harus pergi ke luar desa untuk bekerja di ladang orang lain atau mencari pekerjaan serabutan.

Tingkat Pemahaman dan Pendidikan masyarakat

Berdasarkan hasil analisis peneliti, Tingkat pemahaman dan Pendidikan masyarakat merupakan menjadi salah satu hambatan utama dalam penataan dalam penataan lingkungan didesa. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta aktif dalam pembangunan dapat dikatakan masih terbatas, karena meskipun ada rencana pembangunan, mereka tidak selalau berpartisipasi secara sukarela. Kebanyakan dari mereka hanya ikut serta bila ada paksaan atau undangan langsung dari aparat desa.

Masyarakat dengan tingkat Pendidikan yang rendah atau pemahaman terbatas tentang masalah lingkungan cenderung kurang mendukung program-program penataan yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi terkait. Mereka sering kali tidak menyadari dampak jangka Panjang dari perilaku yang merusak lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan.

Pendidikan adalah aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, karena dengan Pendidikan, seseorang dapat memperbaiki sikap, perilaku dan kualitas hidupnya. Namun, berdasarkan data Pendidikan didesa kinopasan, peneliti menunjukkan hasil penelitiannya data Pendidikan didesa tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat

memiliki tingkat Pendidikan yang cukup , dengan sebagai besar berpendidikan tingkat SMP. Oleh karena itu, pemerintah perlu menggali potensin pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa peneliti menyimpulkan bahwa fungsi instruktif sudah terpenuhi, karena melihat fakta dilapangan kepala desa memang sudah melaksanakan perannya dengan baik, Sebagaimana khususnya, kepala desa sebagai pemimpin didesa memiliki tanggung jawab untuk memberikan perintah kepada aparat desa dan masyarakat terkait dengan perkembangan desa, pemerintah desa mempunyai peran penting dalaam pelaksanaan penataan lingkungan pemukiman. Karena, sebagai kepala pemerintahan, pemerintah desa harus mmpu berpikir dan bertindak dengan bijaksana dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Keputusan yang diambil harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Berikutnya fungsi konsulatif sudah terpenuhi, pemerintah desa dalam hal ini pemerintah desa atau kepala desa terhadap bagaimana caraa menetapkan keputusan terutama menyangkut masalah desa melihat fakta pemerintah desa memiliki kemampuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan untuk penataan lingkungan pemukiman didesa kinopasan, sehingga masyarakat desa kinopasan dapat saling memahami satu sama lain dalam menata lingkungan di Desa Kinopasan. Fungsi pelayanan masyarakat juga sudah cukup baik karena pelayanan pemerintah desa dinilai cukup baik dalam hal komunikasi dan keterbukaan, namun masih terkendala anggaran dalam penataan fisik, terutama perbaikan jalan.

Selanjutnya fungsi pengembangan terhadap masyarakat, bisa dikatakan sudah terpenuhi karena pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam pengembangan desa, dimana semangat gotong royong selalu diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini, berarti bahwa setiap kegiatan pembangunan harus melibatkan masyarakat secara kolektif. masyarakat juga memiliki peran penting sebagai penilai atau penyaring, karena mereka lebih memahami kebutuhan dan kondisi pembangunan yang ada didesa. Begitupun dengan fungsi partisipasi pikiran juga sudah terpenuhi, karena pemerintah desa sering mengundang masyarakat untuk berpartisipasi pikiran dalam memberikan ide dan gagasan terkait perencanaan pembangunan desa, karena masyarakat desa yang paling mengetahui kondisi dan kebutuhan desa mereka. Adapun fungsi partisipasi tenaga dapat dikatakan belum terpenuhi, karena tenaga kerja merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat desa yang sangat memiliki potensi besar untuk dioptimalkan dalam proses pembangunan desa, tetapi sebagian besar masyarakat tidak bisa memberikan partisipasi tenaganya karena masyarakat Desa Kinopasan mayoritas sebagai petani untuk mengandalkan pemenuhan kebutuhan sehari-harinya.

DFTAR RUJUKAN

- Abe, A. (2005). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta : Pustaka Jogja Mandiri.
- Ahdan, M., & Safar, A. W. (2024). Kinerja Badan Permusyarawatan Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 1(2).
- Busro, M. (2018). *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Prenadamedia Group.
- Daniati. (2022). Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Galang Kabupaten. *Tolis Ilmiah; Jurnal Penelitian*, 4(1).
- Darmadi, H. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Dina Malihah. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Di Desa Binangun Kecamatan Bantarsari Cilacap Jawa Tengah*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Edi Suharto. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. PT Refika Aditama.

- Gafar, M. (2022). Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(6), 2551–2566.
- Harbani, P. (2008). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : CV.Alfabeta.
- Lestari, A. (2021). Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan Di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 3(1), 122–126.
- Miles, M. B. & A. M. H. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, S. (2012). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Nur'aini, A. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kelurahan Leok 1 Kecamatan Biau Kabupaten Buol. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12).
- Rusni. (2021). *Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Good Governance di Desa Cirot-Ciro Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/5hjcq>
- Sawir, M. (2017). Kualitas Pelayanan Akademik Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Madako Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 5(2).
- Siagian, S. P. (2000). *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi Dan Strategi)*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soetomo. (2009). *Pembangunan Masyarakat*, (Issue 2). PT. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sujarweni, W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukardi. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Sutikno, S. (2014). *Metode & Model-Model Pembelajaran*. Lombok; Holistica.
- Veithzal Rivai. (2006). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Edisi Satu*. PT. Raja Grafindo.
- Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangunan Alternatif*. Jogjakarta: A-ruzz Media.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (2011).